

PERAN AKUNTAN DALAM PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Paulina Permatasari

Abstract

Comprehensive Corporate Governance concept start growing since 'The New York Stock Exchange Crash' on October 1987, where there were many multinational company recorded in New York Stock Exchange, had big financial losses. At that time, for hiding the internal problem in their company, many executives did 'window dressing' and also 'financial engineering'. Triggering with that event, many Good Corporate Governance concept are developed. At the same time, Accountant are forced to accommodate executives in implementing GCG in their companies.

Pendahuluan

Good Corporate Government (GCG) bukan hal baru di Indonesia. Kalau akhir-akhir ini jadi topik pembicaraan, itu disebabkan karena bangkitnya kesadaran corporate secara nasional untuk ikut memikul tanggung jawab dalam rangka memulihkan kondisi perekonomian Indonesia. Bangkitnya kesadaran itu sendiri terjadi setelah hasil evaluasi maupun kajian dari berbagai aspek bisnis menunjukkan bahwa krisis bukan semata-mata dari efek domino (krisis Asia). Melainkan dampak bisnis yang dilakukan perusahaan di Indonesia yang tidak mengindahkan GCG.

Indikasi ini menjadi kuat, saat satu per satu perusahaan yang tadinya diperkirakan sehat, berguguran karena tidak diterapkannya GCG. Padahal bila saja perusahaan menerapkan GCG, hal tersebut minimal dapat dihindarkan. Di sinilah persoalannya, kenapa GCG belum diterapkan? Ada dua alasannya. Pertama, sosialisasi manfaat GCG belum banyak diketahui oleh perusahaan. Kedua, masih sangat lemahnya peran pengawasan di perusahaan lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI). Hal itu menyebabkan terganggunya obyektivitas independensi SPI itu sendiri. Misalnya, pengangkatan kepala SPI oleh direksi. Padahal seharusnya diangkat oleh pemegang saham (stakeholder). Demikian juga laporan yang dibuat SPI seharusnya tidak ke direksi atau manajemen, melainkan langsung ke dewan komisaris.

Dengan GCG, masalah seperti ini kelak dapat disempurnakan agar segalanya bisa lebih transparan, sehingga sistem pengawasan di perusahaan dapat berjalan baik dan benar.

Definisi Good Corporate Governance

Saat ini, institusi yang berkecimpung dalam mempromosikan Good Corporate Governance telah cukup banyak, baik pihak swasta maupun publik. Forum yang telah membahas isu ini sudah sangat sering, demikian pula literatur yang mengupas topik ini sudah mulai bermunculan. Berikut ini dikutip beberapa rumusan pengertian tentang rangkaian kata tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara / Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. KEP-23/M/PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000, Good Corporate Governance didefinisikan :

Good Corporate Governance adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata – mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

The Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), sebuah lembaga privat yang didukung oleh beberapa tokoh senior, menggunakan definisi sebagai berikut :

Good governance is a collection of broad principles and practices for the efficient, effective, and provitable running of an organization in pursuit of strategic objectives and in compliance with principles of best business practice and applicable legal and regulatory requirements.

Sedangkan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikannya sebagai berikut :

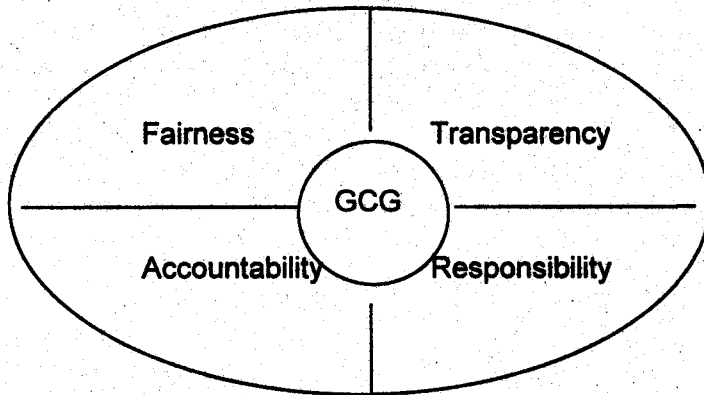
A set of relationship between a company's management, its board, its shareholders and other stakeholders.

The structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined.

A system of checks and balances over the control of a firm thereby reducing the chances of mismanagement and misuse of corporate assets

Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance

Sebagai suatu konsep yang tergolong baru dipandang perlu untuk menentukan dasar – dasar / kaidah yang menjadi landasan dalam menjabarkan konsep tersebut. Beberapa institusi yang concern terhadap pengembangan konsep GCG telah mencoba mengajukan beberapa hal yang dianggap menjadi prinsip – prinsip dalam GCG. Dan bahkan dalam konteks tumbuhnya kesadaran akan arti penting Corporate Governance ini, OECD telah mengembangkan seperangkat prinsip – prinsip GCG dan dapat diterapkan secara fleksibel sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi di masing – masing negara, seperti terlihat pada gambar berikut ini :



Sumber : Corporate Governance : Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesi

Tujuannya adalah untuk meletakkan landasan bagi pengembangan pelaksanaan GCG di lingkungan perusahaan. Prinsip – prinsip tersebut dimaksud menjadi pegangan dalam penjabaran tindakan dan langkah – langkah yang hendak dilakukan dalam mewujudkan GCG dan seyogyanya menjadi patokan dalam pengujian keberhasilan aplikasi GCG di masing – masing organisasi atau perusahaan.

Prinsip – prinsip OECD di atas mencakup lima bidang utama : hak – hak para pemegang saham dan perlindungannya; peran para karyawan dan pihak – pihak yang berkepentingan lainnya; pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi sehubungan dengan struktur operasi koperasi; tanggung jawab dewan terhadap perusahaan, pemegang saham, dan pihak – pihak yang berkepentingan lainnya, atau secara ringkas prinsip – prinsip tersebut dapat dirangkup sebagai berikut :

a. Kewajaran (Fairness)

Kesetaraan perlakuan bagi seluruh pemegang saham, agar terproteksi dari fraud, self dealing atau kesalahan lainnya yang bersumber dari dalam. Terkait dengan prinsip ini adalah hal berikut ini :

- Menetapkan aturan perusahaan untuk melindungi kepentingan pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas.
- Menetapkan corporate conduct dan/atau kebijakan kepatuhan untuk melindungi dari kesalahan yang berasal dari dalam, self dealing dan konflik kepentingan.
- Menetapkan peran dan tanggung jawab komisaris, manajemen dan komite-komite termasuk system remunerasi.

- Wajar dalam mengemukakan setiap informasi material/diungkapkan secara penuh (full disclosure)
- b. Akuntabilitas (Accountability)
 Pertanggungjawaban dari manajemen melalui pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan peran Komisari, Direksi, dan Auditor baik internal dan eksternal. Terkait lebih detail menyangkut prinsip ini adalah sbb :
 - Membentuk komite audit untuk memperkuat fungsi pengawasan oleh komisaris.
 - Membentuk dan menetapkan kembali peran dan fungsi audit intern sebagai mitra bisnisstrategis berdasarkan praktik terbaik (tidak hanyaaudit kepatuhan).
 - Menetapkan system penilaian kinerja melalui akuntansi sisten Informasi yang baik.
 - Penegasan peraturan (system penghargaan dan sanksi)
 - Memelihara manajemen konyrak yang accountable dan penanganan dispute.
 - Menggunakan Auditor Eksternal yang berkualitas (professional).
- c. Transparansi (Transparency)
 Pengungkapan informasi kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu

Transparansi. Termasuk di dalam prinsip ini di antaranya :

- Mengembangkan Sistem Akuntansi berdasarkanStandar Akuntansi dan Praktik Terbaik untuk memastikan kualitas dari laporan keuangan dan disclosure.
 - Mengembangkan Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Manajemen untuk memastikan penilaian kinerja yang baik dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh komisaris dan manajemen.
 - Mengembangkan Manajemen Resikodalam tingkatan perusahaan untuk memastikan seluruh risiko dapat dikelola pada tingkat yang dapat ditolerir.
- d. Tanggung Jawab (Responsibility)
 Peran perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi hukum dan regulasi dengan memperhatikan lingkungan masyarakat. Termasuk pula di sini adalah :
- Mempertimbangkan tanggung jawab social
 - Menghindari penyalahgunaan kekuasaan
 - Menjadi professional dan memenuhi etika
 - Lingkungan bisnis yang baik

Pilar Good Corporate Governance dan kaitannya dengan Peran Akuntan dalam Penerapan GCG

Berikut adalah pilar-pilar yang membentuk Good Corporate Governance :

a. *Protecting right of shareholder*

Terdiri dari :

- Aspek-aspek yang berkaitan dengan perlindungan hak pemegang saham yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- Pelaksanaan RUPS dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku
- Informasi yang diberikan kepada pemegang saham disampaikan secara lengkap sebelum rapat dilaksanakan
- Memasukkan penjabaran hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perusahaan terhadap pemegang saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar ke dalam Pedoman Kebijakan Perusahaan

b. *Roles and function of BOC, BOD and Committees*

Terdiri dari :

- Pemilihan direksi melalui proses fit and proper test
- Peran dan fungsi direksi, komisaris telah ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan dan RUPS.
- Pedoman kebijakan perusahaan (corporate policy manual) sebagai acuan utama dalam penyusunan kebijakan dan prosedur ditingkat berikutnya.
- Aturan standar tentang peran dan tanggung jawab dewan direksi yang mengacu pada pedoman kebijakan perusahaan
- Rapat antaradireksi dan komisaris dilakukan secara berkala untuk membahas rencana kerja
- Komite audit yang dibentuk untuk membantu komisaris
- Pembentukan beberapa komite yang dirasakan perlu, misalnya komite seleksi dan remunerasi.

c. *Strategic Corporate Objectives and performance measurement system.*

Terdiri dari :

- Pembentukan visi dan konsep bisnis perusahaan dan disosialisasikan secara luas keseluruh jajaran karyawan yang menjadi landasan dalam mengambil inisiatif strategis,
- Fungsi perencanaan yang berjalan secara optimal, yang tercermin antara lain perumusan strategi yang didasari pada pengkajian yang memadai
- Dipergunakannya key performance indicator (KPI) sebagai acuan dalam melaksanakan penilaian kinerja yang dikaitkan dengan reward and compensation system.

d. *Risk management, compliance and audit.*

Terdiri dari :

- Perumusan kebijakan dan kerangka manajemen risiko, yang sejalan dengan tujuan perusahaan, yang dilanjutkan dengan pengukuran

tingkat risiko dari setiap business process, termasuk implikasinya terhadap keuangan, tujuan perusahaan dan kepentingan stakeholder.

- Pembentukan unit kerja manajemen risiko yang bertanggung jawab dalam identifikasi risiko yang ada, termasuk penyusunan risk portfolio dan penetapan risk mitigation atau risk treatment (evaluate and monitoring)
- Kewajiban memiliki dokumen tertulis (piagam audit intern) sebagai acuan peran dan fungsi audit intern
- Meningkatkan peran internal auditor sebagai business partner dalam memberikan nilai tambah dalam proses bisnis yang mencakup, antara lain identifikasi inefisiensi proses, kontribusi terhadap perencanaan strategis (compliance audit/corporate police vs mitra bisnis/internal consultant)

e. Accounting MIS and Information Technology

Terdiri dari :

- Menyusun Pedoman Akuntansi (PA), termasuk accounting policy and procedure, disamping pemutakhiran PA secara berkala, untuk kemudian dilakukan sosialisasi kepada pengguna.
- Ketersediaan informasi keuangan yang tepat waktu dan akurat yang didukung dengan ketersediaan teknologi informasi yang memadai.
- Menyusun rencana induk pengembangan system informasi sesuai dengan rencana strategis usaha dengan mempertimbangkan skala prioritas.
- Mengembangkan alternatif pemanfaatan teknologi tepat guna (proper cost investment) dalam mendukung aktivitas perusahaan yang berkemampuan memenuhi kebutuhan informasi secara timeliness and accurate

f. Organization, human, resources, business ethics.

Terdiri dari :

- Menetapkan sasaran dan strategi pengembangan karyawan di setiap tingkatan dalam bentuk pelatihan dan pengembangan keahlian
- Menyusun mekanisme penilaian terhadap remunerasi dan promosi dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab dan pencapaian kinerja
- Meningkatkan keterbukaan dalam menyampaikan aspirasi dan menumbuhkan rasa memiliki dengan memberikan kesempatan bagi seluruh jajaran perusahaan (asas keterbukaan dan transparansi) dalam menerima informasi menyangkut keadaan keuangan perusahaan, pencapaian kinerja, kepemilikan dan pengaturan perusahaan.
- Peraturan kepatuhan/standar etika kerja (code of conduct) yang dilaksanakan secara konsisten, didukung dengan budaya patuh dan ketegasan penerapan sanksi.

Terkait dengan peran Akuntan dalam penerapan GCG maka sebelumnya perlu diperhatikan hal yang mendasari penerapan GCG. Pertama, perlunya sistem pengawasan. Kedua, untuk mencapai Return on Investment (ROI) sesuai target. Agar ROI sesuai target terdapat dua kata kunci yang harus dipenuhi, yaitu: produktivitas dan efisiensi. Artinya, kalau GCG diterapkan maka produktivitas menjadi tinggi dan efisiensi usaha dapat diukur. Ukurannya perusahaan dapat menghasilkan output yang besar, dan sebaliknya inputnya kecil. Output dapat berupa pendapatan dan penjualan, sedangkan inputnya berupa sumber daya dan biaya. Jadi, bicara GCG sama dengan bicara pengawasan dan ROI. Selanjutnya akan diuraikan bagaimana peran dari Akuntanan Manajemen, Auditor Independen, dan Internal Auditor dalam penerapan GCG.

Peran dari Akuntan Manajemen

Peran akuntan manajemen disini dapat meliputi beberapa hal berikut. Pertama, membuat disain sistem pengendalian manajemen. Kedua, membuat laporan jalannya sistem pengendalian manajemen kepada manajemen. Ketiga, membuat feed back laporan manajemen. Dan keempat, melakukan pemeriksaan jalannya sistem pengendalian manajemen yang akan dilaporkan kepada direksi.

Peran dari Auditor Independen

Auditor Independen merencanakan dan melaksanakan penugasan audit berdasarkan Generally Accepted Auditing Standards (GAAS) untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan terlepas dari kesalahan penyajian yang material yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kecurangan. (Catatan: auditor independen tidak bertanggung jawab untuk mendeteksi setiap kesalahan dan/atau kecurangan sepanjang proses audit dilakukan dengan mengikuti standar yang berlaku).

Tujuan dari Audit Laporan Keuangan

- Tujuan dari audit laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dari laporan keuangan dalam semua aspek berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum (GAAP)
- Laporan keuangan yang telah diaudit akan dipergunakan bagi stakeholder dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan perusahaan tersebut
- Pendapat wajar (clean opinion) dari auditor independen akan sangat berarti bagi perusahaan dalam menunjukkan adanya penerapan corporate governance

Tanggung Jawab Manajemen

- Akurasi dan kelengkapan atas angka yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan
- Mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum (GAAP)
- Menerapkan dan memelihara system pengawasan internal (Internal Control System) yang baik/memadai.

Peran dari Independen Auditor dalam Penerapan GCG

- Independen Auditor wajib bersikap professional dalam menyampaikan opininya berdasarkan standar professional. Opini yang diberikan menjadi salah satu indikator seberapa jauh perusahaan telah menerapkan Good Corporate Governance, meskipun tanggung jawab utama dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG ada pada pihak manajemen perusahaan itu sendiri
- Disisi lain, profesi akuntan juga memperkuat standar akuntansi dan audit untuk meyakinkan bahwa profesionalisme mereka merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dalam melindungi kepentingan stakeholder.

Peran dari Auditor Internal

Dalam perkembangannya, sesudah pengendalian internal berjalan dengan baik, auditor internal dituntut berfungsi lebih jauh menjadi ' strategic business partner ' khususnya dalam mendukung terwujudnya GCG. Usaha untuk meningkatkan fungsi ini dapat dilakukan melalui berbagai usaha antara lain :

- Memberikan masukan kepada manajemen mengenai perbaikan dan penyempurnaan berbagai prosedur dan proses bisnis
- Memberikan masukan mengenai usaha – usaha peningkatan efisiensi melalui pengurangan pemborosan, dan peningkatan efektivitas melalui penilaian pencapaian strategi bisnis perusahaan
- Membantu menciptakan pengendalian internal yang baik
- Memastikan bahwa pengendalian internal telah dipatuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan

Upaya melakukan GCG dapat dilakukan jika masing – masing pihak dalam perusahaan menyadari perannya untuk mewujudkan GCG. Berikut adalah peran yang dapat diambil oleh para manajer, akuntan manajemen dan auditor internal dalam mendukung terwujudnya GCG di perusahaan.

Para manajer perusahaan dapat berperan secara efektif terhadap corporate governance dengan melakukan tindakan – tindakan antara lain : mengidentifikasi secara layak, mengevaluasi, dan mengelola resiko dan peluang; menindaklanjuti kebijakan perusahaan dan menjelaskan tujuan perusahaan secara lengkap; menaati standar – standar etika; dan memandang dewan direksi perusahaan sebagai ahli dan kewenangan legalnya diakui.

Akuntan manajemen dapat berperan dalam menyusun sistem informasi atas penilaian kinerja masa lalu dan aktivitas masa depan yang disetujui dan direncanakan; merancang dan menerapkans istem internal control yang berperan sebagai dewan penjamin; menjamin bahwa pendelegasian wewenang ditaati; dan mengawasi d cc

Auditor Independen dapat berperan dalam hal ini dengan berupaya bersikap professional dalam menyampaikan opininya berdasarkan standar

professional, yang selanjutnya menjadi salah satu indikator seberapa jauh perusahaan telah menerapkan Good Corporate Governance

Auditor internal dapat berperan dalam membantu dewan dalam menilai dan memberi nasihat pada pihak manajemen; mengevaluasi sistem internal kontrol dan bertanggung jawab kepada komite audit; dan bahkan menelaah peraturan corporate governance minimal setahun sekali.

DAFTAR PUSTAKA

1. J. Fred Weston; Juan A. Siu; Brian A. Johnson. Takeovers, Restructuring, and Corporate Governance. Prentice Hall, Third edition, 2002
2. Yusuf Faishal, Dr. ' Pedoman Praktis untuk Anggota Dewan Komisaris, Komite Audit, & Sekretaris Korporat . Plus Prinsip – Prinsip & Praktek Good Corporate Governance ', Institut Komisaris Perseroan Indonesia, Oktober 2002
3. I Nyoman Tjager, SH., MA, Drs. F. Antonius Alijoyo, MM, MBA; Humphrey R. Djemat, SH., LL.M; Mayjen TNI (Purn) Dr. Bambang Soembodo, MM, MBA .Corporate Governance : Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia, Jakarta : PT Prenhallindo, Edisi Pertama, 2003
4. Makalah Deddy Rinaldi : ' Peran Akuntansi Dalam Penerapan Good Corporate Governance ', April 2002
5. Makalah Agung Adiprasetyo : ' Apa dan bagaimana Good Corporate Governance ', April 2002
6. 'Pengantar Good Corporate Governance '. Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP), Juli 2001